

ANALISIS KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MUSRENBANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA KOTA AGUNG, LAMPUNG UTARA

Gesit Yudha¹, Nurul Abror²

UIN Raden Intan Lampung

gesit@radenintan.ac.id

nurulabor@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine stakeholder involvement in the Village Development Planning Deliberation (Musrenbang) and its impact on the quality of village development policies in Kota Agung, North Lampung. The study uses a qualitative approach with descriptive analysis of the participatory process starting from the Hamlet Deliberation (Musdus) to the village Musrenbang forum, where various community elements such as the RT Head, youth leaders, women leaders, religious leaders, PKK, and Posyandu cadres play an active role in conveying aspirations and determining development priorities. The results show that high community participation, which reached 99%, contributed significantly to increasing transparency, accountability, and efficiency of development budget allocation. The integration of social, religious, and economic empowerment aspects in development proposals resulted in policies that were more responsive to the real needs of the community, encouraged local economic growth, and improved public services. Despite obstacles such as budget limitations and coordination challenges between levels of government, the Musrenbang mechanism proved effective as a strategic instrument in realizing sustainable and quality village development. The findings of this study suggest increasing the socialization of the scope of Musrenbang and strengthening synergies between agencies to support the sustainability and optimization of the implementation of village development policies.

Keyword: *Musrenbang, Stakeholders, Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan keterlibatan pemangku kepentingan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dan dampaknya terhadap kualitas kebijakan pembangunan

desa di Kota Agung, Lampung Utara. Studi menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap proses partisipatif yang dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) hingga forum Musrenbang desa, di mana berbagai elemen Masyarakat seperti Ketua RT, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, PKK, dan kader posyandu berperan aktif dalam penyampaian aspirasi dan penentuan prioritas pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya partisipasi masyarakat, yang mencapai 99%, berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi alokasi anggaran pembangunan. Integrasi aspek sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi dalam usulan pembangunan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan publik. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan tantangan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, mekanisme Musrenbang terbukti efektif sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkualitas. Temuan penelitian ini menyarankan peningkatan sosialisasi ruang lingkup Musrenbang serta penguatan sinergi antar instansi guna mendukung keberlanjutan dan optimalisasi implementasi kebijakan pembangunan desa.

Kata Kunci: Musrenbang, Pemangku kepentingan, Pembangunan

PENDAHULUAN

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan pertemuan yang diadakan setiap tahun sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Kemajuan dalam musyawarah ini sangat bergantung pada keberadaan tiga elemen utama dalam tata kelola pemerintahan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, Musrenbang juga berfungsi sebagai wadah edukasi bagi masyarakat, mendorong keterlibatan aktif mereka dalam sistem pemerintahan dan proses pembangunan. (Nadira 2021) Keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan dan implementasi pembangunan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kegiatan atau program yang diambil dalam pembangunan harus mengikutsertakan masyarakat dalam pemilihan tersebut. (Arif Hidayat, Melinda Noer, and Erwin 2022) Meskipun terdapat tantangan seperti korupsi dana desa dan

keterbatasan sumber daya, keberhasilan beberapa desa dalam mengelola potensi lokal menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, desa dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.(Arif Hidayat, Melinda Noer 2022)

Musyawarah perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) sejatinya merupakan forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan usulan program dari pemerintahan. Dalam praktiknya, Musrenbang memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. salah satu masalah utamanya adalah ketidakmampuan model perencanaan ini tidak mampu memuaskan semua pihak. Hal itu disebabkan desain Musrenbang masih sentralistik (*Top Down Planning*) ditandai dengan pendekatan perencanaan yang seragam antara pusat dan daerah, dan ketergantungan daerah terhadap anggaran dan program pemerintah pusat masih cukup tinggi. (Herawati 2019) Partisipasi masyarakat berperan sebagai input dan output, proses partisipasi dapat dibagi beberapa tahap yaitu penerimaan informasi, pemberian tanggapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerimaan hasil. Dalam konteks Pembangunan partisipasi masyarakat sebagai input diharapkan menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output, partisipasi diharapkan memberikan stimulasi atau motivasi masyarakat dengan beberapa upaya.(BKKBN 2024)

Telaah kajian ilmiah terdahulu Gerry Rumegang, Johanis E. Kaawoan dan Ismail Sumampouw,(Rumegang, Kaawoan, and Sumampouw 2021) Ricardo Tahulending, Markus Kaunang dan Ismail Sumampow(Tahulending, Kaunang, and Sumampow 2018) bahwa pemerintah desa tidak serta-merta memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk berkarya bagi desanya melaikan warga masyarakat hanya menjadi penonton terhadap pemerintah lewat wacana program-program yang ada. Dengan demikian kebaruan dalam riset ini menelaah sejauh mana keterlibatan pemangku kepentingan (terutama masyarakat) dalam Musrenbang dan apakah keterlibatan tersebut berdampak pada kualitas kebijakan pembangunan desa kota agung, Lampung Utara.

Berdasarkan data pra riset, bahwa Musrenbang Desa Kota Agung tahun 2023 dilaksanakan 1 tahun sebelumnya yakni pada 6 Desember 2022 dengan menghasilkan usulan rencana Pembangunan program tahun 2023 dengan dihadiri oleh 30 orang terdiri dari unsur Masyarakat, Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat dan Ibu-Ibu PKK.(Anwar, wawancara pribadi

12 Desember 2024.) Berikut data usulan hasil musrenbang tingkat Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Uraian Kegiatan Penghubung Jalan Antar Desa Banjar Ketapang Dengan Desa Kota Agung	Lokasi
1.	Dusun 2	
2.	Pembangunan Trotoar	RT.03/RW.01
3.	Pembangunan Gorong-Gorong	RT.04/RW.01
4.	Pembangunan Gorong-Gorong	RT.01/RW.02
5.	Rehab TK	RT.01/RW.01
6.	Rehab Posyandu	RT.05/RW.01
7.	Pembangunan Drainase	RT.04/RW.01
8.	Pembangunan Pelebaran Bahu Jalan	RT.04/RW.01
9.	Pembangunan Jalan Subase	Dusun 02
10.	Pembangunan Siring/Tpt	RT.02,03/RW.02

Sumber: Berita Acara Musrenbang Desa Kota Agung

Kecamatan Sungkai Selatan, Tahun 2022(Pemerintahan Desa kota Agung 2024)

Usulan tersebut akan diusulkan kemusrenbang kecamatan untuk menentukan skala prioritas kecamatan, Dalam musrenbang Tingkat kecamatan cara pengambilan aspirasi hanya melalui system perwakilan. Adapun hasil skala prioritas yang dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu kondisi yang mendesak sehingga harus segera dilakukan perbaikan, Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya, dan dampak sosial ekonomi masyarakat. Berikut hasil musrenbang yang masuk dalam skala prioritas di tingkat kecamatan:

Tabel 1.2

No	Uraian Kegiatan
1.	Penghubung Jalan Antar Desa Banjar Ketapang Dengan Desa Kota Agung
2.	Pembangunan Trotoar
3.	Pembangunan Gorong-Gorong

Sumber: Berita Acara Musrenbang Desa Kota Agung

Kecamatan Sungkai Selatan, Tahun 2023(Pemerintahan Desa kota Agung 2024)

Berdasarkan hasil skala prioritas Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2023, program-program yang telah disepakati untuk menjadi prioritas tersebut baru dapat direalisasikan pada tahun 2024. Menurut hasil observasi data dilapangan Bahwa Penundaan pelaksanaan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran, perlunya proses perencanaan teknis yang lebih matang, dan persaingan antara usulan-usulan desa lainnya di musrenbang tingkat kecamatan dan di Musrenbang Kabupaten.(R. Efendi, wawancara pribadi, 4 Mei 2024) Keterlambatan pelaksanaan dapat mengurangi relevansi program jika kebutuhan masyarakat telah berubah atau jika ada prioritas baru yang lebih mendesak. Selain itu, efektivitas juga bergantung pada kesiapan anggaran, tenaga pelaksana, dan mekanisme monitoring serta evaluasi. Pada hasil musrenbang harusnya dilaksanakan, setelah proses yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menggali, menyerap dan menampung serta memahami aspirasi, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan Masyarakat, ternyata pemerintah daerah dan DPRD tidak menjamin seluruh usulan Masyarakat dalam musrenbang akan dilaksanakan. Karena itu membuat masyarakat menganggap kegiatan yang seri monial. Padahal Musrenbang sebagai salah satu upaya menyerap aspirasi, melalui cara diskusi untuk mendapatkan sebuah Pembangunan, sebagai acara rutin yang bersifat seremonial, lalu hasil musyawarah Masyarakat tidak mendapat perhatian serius.(observasi“Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Desa Kota Agung Tahun 2023” 2024)

Berdasarkan permasalahan serta fenomena diatas maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui lebih dalam terkait keterlibatan

pemangku kepentingan dalam musrenbang dan dampaknya bagi kualitas kebijakan Pembangunan di desa kota agung, Lampung Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Musrenbang

Berdasarkan Kepmen nomor: 050-187/Kep/Bangda/2007(Kemendagri.) yang dapat disimpulkan menjadi tiga faktor, yaitu:

1. Data Musrenbang

Penilaian atas komponen data musrenbang ditujukan untuk mengetahui data tempat penyelenggaraan musrenbang, profil peserta dan tingkat kehadiran masyarakat dalam penyelenggaraan musrenbang kecamatan tersebut.

2. Persiapan Musrenbang

Penilai atas komponen persiapan Musrenbang meliputi: Pengorganisasian penyelenggaraan, Proses musyawarah yang mengawali musrenbang, Ketersediaan informasi bagi peserta.

3. Pelaksanaan Musrenbang

Penilaian atas komponen pelaksanaan Musrenbang meliputi: Jadwal dan tempat pelaksanaan, informasi yang disampaikan dalam pemaparan narasumber, keterwakilan stakeholder dan nara sumber, ketersediaan dan kompetensi fasilitator, fasilitas dan peralatan pendukung. Serta Rumusan kesepakatan akhir dan naskah kesepakatan musrenbang kecamatan

B. Konsep Pembangunan

Dalam konteks pembangunan bangsa, pembangunan diartikan sebagai upaya atau rangkaian upaya pertumbuhan dan perubahan yang disengaja oleh negara, bangsa dan pemerintah menuju modernitas. Di kutip dari buku yang ditulis oleh Iskandar Kato Dkk, dimana Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho menyebutkan bahwa, pembangunan dapat diartikan sebagai perubahan derajat kesejahteraan yang nyata dan alamiah. Aspek definisi ekonomi, sosial, politik, dan hukum menentukan perubahan tingkat kesejahteraan. Untuk membedakan perubahan alami dari perubahan buatan yang disebabkan oleh kekuatan di luar komunitas manusia, pembangunan menekankan pada perubahan alami.(Iskandar Kato 2021)

Pembangunan fisik diartikan sebagai alat atau sarana yang membantu masyarakat secara langsung, seperti prasarana penghubung, prasarana sosial, dan prasarana produksi. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan positif yang hanya dapat diwujudkan dengan melibatkan dan menggerakkan manusia dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi hasilnya. (Iskandar Kato 2021) Pembangunan adalah upaya sistematis dan jangka panjang di banyak bidang lainnya. Perubahan bentuk sosial, perubahan kehidupan masyarakat, dan perubahan kelembagaan negara adalah bagian dari proses pembangunan. (Iskandar Kato 2021) Menurut buku yang ditulis oleh Robert Tua Siregar dimana Suetomo mengartikan pembangunan masyarakat sebagai proses transformasi menuju keadaan yang lebih sejahtera. Dengan begitu, Meningkatkan taraf hidup seseorang dapat dipandang sebagai tujuan yang ingin dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Program pengembangan masyarakat dapat berhasil dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk dapat mencapai pertumbuhan masyarakat. Proses modernisasi mengandung pengertian bahwa pembangunan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam segala aspek, dengan menitikberatkan pada faktor sosial dan ekonomi. (Siregar 2021)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan jenis penelitian field research dengan sifat penelitian Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berupaya mendeskripsikan dan menafsirkan objek menurut apa adanya untuk menggambarkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam musrenbang dan dampaknya bagi kualitas kebijakan Pembangunan di desa kota agung, Lampung Utara.

(Sukardi 2018) Sumber data primer dengan teknik *purposive sampling*, yaitu Teknik pengambilan informan atau narasumber didasarkan atas tujuan tertentu, key informan Bapak Saiful Anwar Selaku Ketua BPD kecamatan Sungkai Selatan, Bapak Kepala Desa Yaitu Hendri Kalnopi dan Bapak Wahyu Bagus Selaku tokoh pemuda Karang Taruna setempat, masyarakat yaitu Ibu Yenita dan Ibu Sugiarti. Sumber data sekunder dengan jurnal yang terkait ataupun penelitian terkait serta data yang tersaji di desa Kota Agung, Lampung Utara. Teknik Analisa data dan penarikan Kesimpulan dengan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Desa Kota Agung, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, tahun 2023 dapat dilihat melalui pendekatan teori pembangunan Rostow. Teori ini menekankan pentingnya tahapan pembangunan sebagai proses bertahap menuju modernisasi. Dalam konteks ini, Musrenbang berfungsi sebagai langkah untuk memenuhi prasyarat pembangunan (*preconditions for take-off*) dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam merumuskan kebutuhan dan prioritas desa. Proses ini menjadi mekanisme penting untuk mendorong percepatan pembangunan (*take-off*) melalui penyusunan rencana berbasis aspirasi lokal yang selaras dengan kebijakan daerah, sehingga pembangunan desa dapat berlanjut ke tahap yang lebih matang dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki berbagai bentuk yang disesuaikan dengan tingkat pelaksanaannya, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang Provinsi, hingga Musrenbang Nasional. Setiap tingkat memiliki tujuan dan fokus yang berbeda, Bentuk-bentuk ini mencerminkan pendekatan partisipatif yang mengutamakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Bapak Saiful Anwar Selaku ketua BPD Desa Kota Agung beliau menjelaskan terkait Bentuk-Bentuk Musrenbang adalah:

“Yang direncanakan untuk tahun anggaran 2023,dari situlah kita mengadakan Musrenbang untuk pembangunan selama 2023, Ada beberapa usulan dari masyarakat juga didanai oleh dana desa,yang terlaksana gorong gorong, dua usulan di terima dri anggaran musrebang,selama ini gk ada hambatan dan masyarakat mengerti Untuk pembangunan desa,99 % masyarakat antusias mengikuti musrebang,dari beberapa elemen masyarakat baik dari tokoh adat,rokok pemuda tokoh agama,tokoh perempuan dari ibu ibu PKK,dri ibu kelompok pengajian,hadir semua mereka,kader kader

posyandu pun hadir. (“Saiful Anwar, Bentuk-Bentuk Musrenbang , Wawancara, 12 Desember 2024,”)

Musrenbang untuk tahun anggaran 2023 dirancang untuk mengakomodasi usulan masyarakat, termasuk pembangunan gorong-gorong yang didanai dari dana desa. Selama ini, Musrenbang berjalan lancar tanpa hambatan, dengan antusiasme tinggi dari 99% masyarakat. Berbagai elemen masyarakat hadir, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, dan kader posyandu.

Seiring penjelasan dari Bapak Kepala Desa Yaitu Bapak Hendri Kalnopi beliau menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2021 ketika rapat musrengang ada usulan-usulan yang mana tidak harus usulan pembangunan, ada juga bidang sosial, agama dan kemasyarakatan, pemberdayaan terus ada juga bidang pembangunan gitu. Kadang-kadang kan masyarakat bilang kalau setiap Musrengbang itu pembangunan padahal ya tidak harus Musrengbang hehe. Ada berita acaranya juga untuk usulan yang sudah di sahkan pada acara Musrengbang tersebut. Nanti kan usulan-usulan tersebut masuk ke kecamatan dan mana yang masuk APBD kabupaten, APBD provinsi dan APBN. Kegiatan itu juga kan ada sumber dananya juga tidak semua dari desa makanya kita pilah-pilah dan tidak semua pembangunan dana desa itu untuk pembangunan. Karena emang kadang-kadang bukan hanya 1 desa tapi kadang juga 1 kecamatan juga gak ada yang dapet maksudnya menggunakan dana APBD itu. 2024 ini kota agung aja yang dapet hasil dari Musrenbang anggaran dari Musrenbang. Ada pengaruh dari hasil Musrenbang itu kita sampaikan, kita kan ada namanya prioritas usulan pada saat Musrengbang kecamatan, jadi kalau kita mau usulkan semua dari 9 desa ini ya kebanyakan, jadi ada skala prioritas jadi setiap desa itu ada 2,3, atau 4 usulan jadi skala prioritas untuk di usulkan seperti itu. Untuk tahun ini juga saya mengajukan program ketahanan pangan

kayak ternak sapi..”.(“Hendri Kalnopi, Bentuk-Bentuk Musrenbang , Wawancara, 12 Desember 2024,”)

Musrenbang tidak hanya membahas usulan pembangunan, tetapi juga bidang sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Semua usulan yang disahkan dalam Musrenbang dicatat dalam berita acara dan diteruskan ke tingkat kecamatan untuk menentukan mana yang masuk ke APBD kabupaten, provinsi, atau APBN. Setiap desa diberi skala prioritas, dengan 2-4 usulan utama. Pada tahun 2024, Desa Kota Agung mendapatkan hasil Musrenbang berupa program ketahanan pangan, seperti peternakan sapi.

Selaras juga dengan apa yang dijelaskan bapak Wahyu Bagas Selaku ketua Karang Taruna Desa Kota Agung beliau menjelaskan terkait Bentuk-Bentuk Musrenbang adalah:

“Ada beberapa usulan terkait Musrenbang itu seperti sarana dan prasarana, keamanan desa seperti siskamling, pos ronda gitu-gitu. Jadi ketika Musrenbang itu di usulkan buat buat lapangan bola kaki gitu, terus jaring gawang juga untuk kegiatan pemuda. Untuk program yang saya ajukan itu termasuk in prioritas dan nanti tinggal di uji di tingkat dusun ataupun desa. Agenda Musrenbang itu penting di adakan, sebab dengan adanya kegiatan Musrenbang kita bakal tau semuanya anggaran itu kemana saja, lalu ya namanya kan musyawarah rencana desa ya dari situ kita bisa masyarakat gak berpikiran buruk tentang pemerintahan desa makanya saya bilang itu penting..”.(“Wahyu Bagas, Bentuk-Bentuk Musrenbang , Wawancara, 12 Desember 2024,”)

Usulan Musrenbang mencakup sarana dan prasarana, keamanan desa seperti siskamling dan pos ronda, serta fasilitas olahraga, seperti lapangan sepak bola dan jaring gawang untuk kegiatan pemuda. Musrenbang dianggap penting karena menjadi wadah untuk mengetahui alokasi anggaran desa secara transparan dan menghindari prasangka buruk masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Sedangkan sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Ibu Yenita selaku masyarakat menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sebagai masyarakat terkait usulan yang sudah di terapkan dengan adanya 3 skala prioritas yaitu pembuatan jalan, pembuatan trotoar, sama pembuatan gorong-gorong kita mengadakan perengkingan gitu mas jadi kita bener2 ambil yang sekiranya mendesak atau prioritasin dari semua usulan-usulan itu. Dan semua usulan itu sesuai dengan keputusan masyarakat juga mas. Saya disini jga mengikuti kegiatan Musrenbang dari awal sampai akhir..”.(“Yenita,Bentuk-Bentuk Musrenbang , Wawancara, 12 Desember 2024,”)

Usulan-usulan dalam Musrenbang diprioritaskan berdasarkan kebutuhan mendesak melalui proses perengkingan. Tiga prioritas utama yang diusulkan adalah pembuatan jalan, trotoar, dan gorong-gorong. Semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan masyarakat, dan Ibu Yenita aktif mengikuti kegiatan Musrenbang dari awal hingga akhir.

Selaras juga dengan penjelasan Sugiarti Selaku ketua PKK beliau menjelaskan terkait Bentuk-Bentuk Musrenbang adalah:

“Saya lihat, kegiatan Musrenbang itu melibatkan banyak pihak, termasuk kelompok ibu-ibu kayak PKK. Ada usulan yang fokus ke pemberdayaan perempuan dan kegiatan sosial. Jadi ya bermanfaat banget buat masyarakat desa..”.(“Sugiarti,Bentuk-Bentuk Musrenbang,Wawancara, 12 Desember 2024,”)

Bahwa Musrenbang melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok ibu-ibu PKK. Usulan yang diajukan sering berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kegiatan sosial, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa secara keseluruhan. Dari penjelasan kelima informan diatas dapat disimpulkan bahwasanya Bentuk-Bentuk Musrenbang meliputi berbagai aspek pembangunan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Musrenbang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti pembuatan jalan, trotoar, gorong-gorong, sarana olahraga, dan pos keamanan, tetapi juga mencakup bidang sosial, keagamaan, dan pemberdayaan perempuan. Proses Musrenbang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, dan

kader posyandu, sehingga mencerminkan partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan desa. Keputusan diambil berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama, dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak dan anggaran yang tersedia.

Dalam upaya menciptakan kebijakan pembangunan desa yang berkualitas, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di Kota Agung, Lampung Utara, menjadi mekanisme yang sangat strategis. Proses partisipatif ini menggabungkan aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan mulai dari kepala dusun, Ketua RT, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, hingga kelompok masyarakat seperti PKK dan kader posyandusehingga kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dari kebutuhan riil warga. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan ini memungkinkan terciptanya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam penetapan prioritas pembangunan.

Proses awal melalui Musyawarah Dusun (Musdus) menjadi tahap kunci di mana gagasan dan usulan dari tingkat akar rumput dikumpulkan secara sistematis. Kepala dusun bersama perwakilan RT dan tokoh lokal menggali aspirasi masyarakat yang kemudian dikompilasi dan disampaikan dalam forum Musrenbang desa. Proses penyaringan usulan yang dilakukan secara objektif memastikan bahwa program-program yang diprioritaskan seperti pembangunan gorong-gorong dan inisiatif ketahanan pangan (misalnya, pengembangan ternak sapi) mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembangunan. Dampak ini terlihat tidak hanya dari segi perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam hal peningkatan mobilitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, kualitas pembangunan yang dihasilkan melalui Musrenbang juga berdampak pada peningkatan layanan publik dan interaksi sosial di desa. Mekanisme verifikasi dan seleksi usulan yang transparan memungkinkan alokasi anggaran dilakukan secara efisien, sehingga setiap dana yang dikeluarkan tepat sasaran dan benar-benar memenuhi kebutuhan prioritas. Peningkatan infrastruktur, misalnya, tidak hanya memperbaiki kondisi fisik desa, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas dan efisiensi transportasi. Selain itu, program-program sosial yang terintegrasi ke dalam kebijakan Pembangunan.

Dampak positif dari peningkatan kualitas pembangunan melalui Musrenbang juga terlihat pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah desa. Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan masyarakat melihat secara langsung hasil dari setiap kebijakan yang diimplementasikan.(Sholihah and Santoso 2022) Hal ini menciptakan iklim kepercayaan yang lebih kuat antara pemerintah dan warga, sehingga partisipasi masyarakat dalam setiap siklus pembangunan pun semakin meningkat. Dengan adanya feedback yang konstruktif, kebijakan yang disusun menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan dasar bagi keberlanjutan pembangunan desa.(Yuniza and Malau 2025)

Meski demikian, terdapat tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kualitas pembangunan yang optimal. Keterbatasan anggaran dan tantangan koordinasi antar tingkatan pemerintahan masih menjadi hambatan yang signifikan. Untuk itu, penguatan sinergi antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi sangat diperlukan agar usulan-usulan prioritas dapat mendapatkan pendanaan yang memadai dan implementasinya dapat terjaga dengan baik.(Susilowati et al. 2022) Selain itu, upaya peningkatan sosialisasi mengenai ruang lingkup Musrenbang perlu terus dilakukan agar masyarakat memahami bahwa pembangunan tidak hanya terbatas pada infrastruktur fisik, melainkan juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.(Far 2022)

Secara keseluruhan, proses Musrenbang yang melibatkan partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat telah menghasilkan kebijakan pembangunan desa yang berkualitas dan berdampak luas. Keterlibatan pemangku kepentingan tidak hanya memperkuat dasar perencanaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta peningkatan layanan publik. (Maryani and Eka 2023)

Dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi pembangunan desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) telah menjadi mekanisme sentral yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat. Musrenbang tidak hanya berfungsi sebagai forum penyampaian aspirasi, melainkan juga sebagai ruang diskusi terbuka antara pemerintah desa dan berbagai elemen masyarakat.(Maryani and Eka 2023) Proses ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dari kebutuhan riil warga, sehingga mampu menghadirkan solusi yang tepat sasaran. Keterlibatan

berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh adat, pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, hingga kelompok-kelompok seperti PKK dan kader posyandu, menunjukkan adanya upaya demokratisasi dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.(Erialdy 2021)

Proses pelaksanaan Musrenbang di Kota Agung dimulai dengan tahapan Musyawarah Dusun (Musdus), yang dipimpin oleh kepala dusun. Pada tahap ini, gagasan dan usulan yang berasal dari tingkat akar rumput dikumpulkan secara sistematis. Kepala dusun menggali berbagai ide dari masyarakat dengan melibatkan perwakilan RT dan tokoh-tokoh lokal, sehingga setiap wilayah di dalam desa memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan kebutuhan dan prioritasnya. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam pengumpulan aspirasi, tetapi juga memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa suara mereka benar-benar diperhitungkan dalam penentuan kebijakan pembangunan. Hasil dari Musdus kemudian dikompilasi dan disampaikan pada forum Musrenbang desa, di mana usulan-usulan tersebut dibahas secara mendalam untuk menetapkan prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya, proses penyaringan usulan di tingkat Musrenbang desa menunjukkan dinamika interaksi antara berbagai elemen masyarakat dan aparat pemerintah. Pada forum tersebut, usulan-usulan yang dikumpulkan tidak hanya berkisar pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan gorong-gorong, tetapi juga mencakup aspek sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa visi pembangunan di Kota Agung tidak semata-mata mengandalkan proyek fisik, melainkan juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Dengan mengutamakan usulan yang paling mendesak dan memiliki dampak signifikan, mekanisme skala prioritas di tingkat kecamatan pun diterapkan. Proses ini memungkinkan penyaringan usulan berdasarkan kriteria kebutuhan, ketersediaan dana, serta potensi sinergi dengan program pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi, dan bahkan APBN.

Dampak positif dari keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan dalam Musrenbang terlihat nyata dari peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan pembangunan desa. Partisipasi luas dari masyarakat tidak hanya memastikan adanya transparansi dalam perencanaan, tetapi juga mengarah pada penyusunan program yang lebih objektif dan tepat sasaran.(Hendrawati and Pramudianti 2020) Mekanisme verifikasi dan

seleksi usulan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat menjamin bahwa dana yang tersedia dialokasikan secara efisien untuk program-program yang benar-benar prioritas, seperti pembangunan infrastruktur vital dan inisiatif ketahanan pangan. Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis pembangunan, tetapi juga mampu meningkatkan rasa memiliki dan kepuasan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Namun demikian, proses Musrenbang tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama, di mana tidak semua usulan dapat terealisasi dalam satu siklus anggaran. Tantangan ini mengharuskan adanya strategi keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, sehingga program-program prioritas dapat terus didukung dan dikembangkan dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi antar tingkatan pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap usulan yang layak dapat mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai. Di sisi lain, masih terdapat persepsi di masyarakat yang cenderung mengasosiasikan Musrenbang dengan pembangunan infrastruktur saja, padahal ruang lingkup Musrenbang mencakup aspek sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi yang juga sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan desa.(Damis et al. 2023)

Secara keseluruhan, analisis ini menggarisbawahi bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam Musrenbang di Kota Agung, Lampung Utara, memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas kebijakan pembangunan desa. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat dari aspirasi masyarakat, sehingga mampu menghadirkan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan.(Pramawati, Suaib, and Qomariyah 2024) Rekomendasi untuk ke depan meliputi peningkatan sosialisasi mengenai ruang lingkup Musrenbang, penguatan sinergi antara pemerintah desa dengan instansi di tingkat yang lebih tinggi, serta penyusunan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi. Dengan upaya-upaya tersebut, Musrenbang berpotensi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengangkat aspek sosial dan ekonomi yang mendasar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Agung.(Musfirah B et al. 2023)

Dengan mengembangkan proses partisipasi yang lebih terstruktur dan sinergi antar tingkat pemerintahan, Musrenbang dapat terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kebijakan pembangunan desa. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat bagi

keberlanjutan pembangunan yang inklusif, di mana setiap elemen masyarakat merasa terlibat dan memiliki peran dalam menentukan arah pembangunan.(Fatmasari et al. 2021) Akhirnya, melalui penguatan mekanisme Musrenbang, diharapkan kebijakan pembangunan desa dapat lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan berkelanjutan bagi seluruh warga Kota Agung, Lampung Utara.(Ginting, Kuswandi, and Budiati 2024)

Pada tahap awal, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) dirancang sebagai mekanisme strategis untuk menggali aspirasi masyarakat, menentukan prioritas pembangunan, serta menyusun rencana anggaran yang tepat sasaran. Dalam konteks Kota Agung, Lampung Utara, kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, sehingga peran serta pemangku kepentingan menjadi krusial dalam mengarahkan pembangunan desa. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan harapan warga secara menyeluruh.(Salangka 2020)

Sebelum pelaksanaan Musrenbang desa, tahapan awal berupa Musyawarah Dusun (Musdus) dijalankan oleh kepala dusun. Dalam proses ini, gagasan dan usulan mengenai prioritas pembangunan dikumpulkan secara sistematis dari berbagai pihak, seperti Ketua Rukun Tetangga (RT), tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, ibu-ibu PKK, kelompok pengajian, serta kader posyandu. Proses ini menghasilkan kompilasi usulan yang kemudian disampaikan dalam forum Musrenbang desa untuk tahun anggaran 2023. Tingginya partisipasi masyarakat, yang mencapai angka 99 persen, menunjukkan antusiasme dan komitmen masyarakat Kota Agung dalam menentukan arah pembangunan desa.

Hasil dari Musrenbang tidak terbatas pada usulan pembangunan infrastruktur semata, melainkan juga mencakup berbagai aspek sosial, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Di antara program-program yang direalisasikan, terdapat pembangunan gorong-gorong dan program ketahanan pangan, seperti inisiatif pengembangan ternak sapi. Mengingat keterbatasan anggaran, tidak semua usulan dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran sehingga penerapan skala prioritas di tingkat kecamatan menjadi strategi penting. Usulan-usulan tersebut disaring dan diprioritaskan berdasarkan kriteria kebutuhan mendesak, serta potensi pendanaan yang berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, hingga APBN.(Firmansyah et al. 2023)

Keterlibatan aktif pemangku kepentingan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kebijakan pembangunan desa. Proses partisipatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan warga. (Akuntansi et al. 2024) Selain itu, mekanisme verifikasi dan seleksi usulan memastikan bahwa alokasi anggaran dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran. Tingginya tingkat partisipasi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan masyarakat, karena mereka merasa memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. (Antono, Setiahad, and Ngalimun 2020)

Meskipun Musrenbang telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan dapat diakomodasi dalam satu siklus pembangunan, sehingga strategi keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya menjadi penting. Selain itu, koordinasi antar tingkatan pemerintahan masih menjadi tantangan, terutama dalam memastikan setiap desa mendapatkan pendanaan yang layak. Tantangan lain adalah persepsi masyarakat yang kadang masih menganggap Musrenbang hanya sebatas pembangunan infrastruktur, padahal proses ini juga mencakup aspek sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dalam Musrenbang di Kota Agung, Lampung Utara, membawa dampak positif terhadap kualitas kebijakan pembangunan desa. Rekomendasi yang muncul antara lain meningkatkan sosialisasi mengenai ruang lingkup Musrenbang agar masyarakat memahami potensi usulan yang lebih luas, memperkuat sinergi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mengoptimalkan alokasi pendanaan, serta menyiapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi program guna memastikan setiap inisiatif terlaksana secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks teori pembangunan Rostow, implementasi program Musrenbang dapat dianalisis melalui beberapa tahapan perkembangan ekonomi. Pada tahap prasyarat untuk *take-off*, Musrenbang berfungsi sebagai dasar penting dalam perencanaan pembangunan desa dengan mengidentifikasi kebutuhan mendesak, seperti pembangunan gorong-gorong untuk kelancaran transportasi. Kegiatan ini mencerminkan fondasi yang dibangun untuk memperkuat sektor-sektor vital yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, terutama dengan memastikan

alokasi anggaran yang sesuai dari berbagai sumber pendanaan seperti dana desa, APBD kabupaten, dan provinsi.

Pada tahap *take-off*, Musrenbang memperlihatkan kemajuan dengan mengutamakan skala prioritas dalam pembangunan, baik fisik maupun sosial. Program-program yang telah disepakati, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana, dan usulan yang tidak terwujud pada satu periode tetap dipertimbangkan untuk masa depan. Proses ini mencerminkan langkah menuju *take-off*, dengan adanya alokasi anggaran yang jelas dan fokus pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Transparansi anggaran menjadi faktor penting dalam memastikan program dilaksanakan secara efisien, yang pada gilirannya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Selanjutnya,

Pada tahap *drive to maturity*, Musrenbang memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan. Program-program seperti pelatihan untuk ibu-ibu PKK yang berfokus pada produktivitas perempuan menggambarkan upaya untuk mencapai kematangan sosial dan ekonomi. Partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan, dalam perencanaan dan pelaksanaan program, mempercepat proses pencapaian kematangan ekonomi dan sosial. Dengan menjaga transparansi anggaran dan melibatkan semua pihak, Musrenbang berfungsi sebagai mekanisme yang mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) di Kota Agung, Lampung Utara, menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemangku kepentingan merupakan elemen krusial dalam menghasilkan kebijakan pembangunan yang berkualitas. Partisipasi dari berbagai elemen Masyarakat mulai dari tingkat dusun hingga forum desa membuktikan bahwa pengumpulan aspirasi secara sistematis dan inklusif dapat menghasilkan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah

desa, kabupaten, dan provinsi dalam mengoptimalkan alokasi anggaran. Meskipun terdapat tantangan seperti keterbatasan anggaran dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan, mekanisme Musrenbang telah terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap kualitas pembangunan, terutama melalui peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya sosialisasi yang terus menerus dan penguatan sinergi lintas sektor, Musrenbang berpotensi untuk menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang Berupa Jurnal Ilmiah:

- Huseno, T. (2018). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Budgetery Slack melalui Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8, (1), 1-10.
- Nurdin, A.H.M & Khairunnisa. (2018). Regional Tax Collecting Innov (Kemendagri), Kementerian Dalam Negeri. N.D. “Peraturan Kemendagri.”
- (R. Efendi, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2024). N.D. “(R. Efendi, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2024).”
- Agung, Pemerintah Desa Kota. 2024. “Berita Acara Musrenbang Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan.”
- Akuntansi, Jurnal, Ilmu Ekonomi, Michi Lussy, And Rochmad Bayu Utomo. 2024. “Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar,” No. 113: 384–93.
- Antono, Andi, Mahmud Setiahad, And Ngalimun Ngalimun. 2020. “Kolaborasi Pembangunan Desa Berkelanjutan Melalui Program Dana Desa Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 8 (2): 102–8. <https://doi.org/10.47828/Jianaasian.V8i2.17>.
- Anwar, S. N.D. “Wawancara Pribadi.”
- Arif Hidayat, Melinda Noer, And Erwin. 2022. “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2017-2018).” *Jurnal Niara* 15 (2): 304–314.

<https://doi.org/10.31849/Niara.V15i2.10143>.

Arif Hidayat, Melinda Noer, And Erwin. 2022. “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Tahun 2017-2018).” *Jurnal Niara* 15 (2): 304–14. <https://doi.org/10.31849/Niara.V15i2.10143>.

BKKBN. 2024. “Musrenbang: Musyawarah Rencana Pembangunan.” 2024.

Damis, Surianti, Hasrianti, A. Rini Sahni Putri, And Aksalmursalat. 2023. “PENATAAN Kawasan Pesisir Pantai Cempae (Community Perceptions Of Cempae Coastal Planning Infrastructure Development) Pembangunan Merupakan Upaya Secara Sadar Untuk Mengelola Dan Memanfaatkan Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Dapat Meningkatkan Mutu Kehidu.” *Jurnal Ilmiah Wahana Laut Lestari* 1 (1): 12–21.

“Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Desa Kota Agung Tahun 2023.” 2024.

Erialdy. 2021. “Pendampingan Masyarakat Sebagai Fasilitator Dalam Memandu Kegiatan Musrenbang Tingkat Kelurahan.” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5 (2): 342–48. <https://doi.org/10.31849/Dinamisia.V5i2.5244>.

Far, Risyart Alberth Far. 2022. “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Sebagai Sistem Komunikasi Dalam Pembangunan Nasional.” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11 (1): 57–76. <https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/7494/6524>.

Fatmasari Et Al. 2021. “Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Oringbele, Kecamatan, Wtihama, Kabupaten, Flores Timur.” *Jurnal Penamas Adi Buana* 5 (01): 79–88.

Firmansyah, Firmansyah, Arif Budiman, Adilansyah Adilansyah, Muhamadong Muhamadong, And Muhammad Nur. 2023. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7 (1). <https://doi.org/10.58258/Jisip.V7i1.4502>.

Ginting, Gunanta, Aos Kuswandi, And Ayuning Budiati. 2024. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Kandui : Faktor Pengaruh Dan Tantangan” 6 (1): 112–23.

Hendrawati, Erna, And Mira Pramudianti. 2020. “Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa.” *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 12

- (2): 100–108. <https://doi.org/10.23969/Jrak.V12i2.3113>.
- “Hendri Kalnopi, Bentuk-Bentuk Musrenbang , Wawancara, 12 Desember 2024.” N.D.
- Herawati, Tengku. 2019. *Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Kota Kuala Simpang*. Medan.
- Iskandar Kato, Dkk. 2021. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Sumatra Utara: Yayasan Kita Menulis.
- Maryani, A'an, Sri, And Agus Eka. 2023. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.” *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik* 3 (1): 1–6. <https://doi.org/10.47753/Pjap.V3i1.38>.
- Musfirah B, Syamsu Alam, Musliha Shaleh, And Fifi Nurafifah Ibrahim. 2023. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Menunjang Pembangunan Pedesaan.” *Center Of Economic Students Journal* 6 (2): 141–55. <https://doi.org/10.56750/Csej.V6i2.579>.
- Nadira, Zahratin. 2021. “Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Tahun 2021.” *Braz Dent J*. 33.
- Pramawati, Fika, Eka Suaib, And Erni Qomariyah. 2024. “Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Analysis Of Public Participation In The Regional Development Planning Deliberation (Musrenbang) Of Konawe District In 2023” 15 (2): 171–82.
- Rumegang, Gerry, Johanis E. Kaawoan, And Ismail Sumampouw. 2021. “Efektivitas Musrenbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud.” *Governance* 1 (2): 1–11.
- “Saiful Anwar, Bentuk-Bentuk Musrenbang , Wawancara, 12 Desember 2024.” N.D.
- Salangka, Wilson P R. 2020. “Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selata.” *Politico : Jurnal Ilmu Politik* 9 (3): 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/plugins/generic/pdfjsviewer/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fejournal.unsrat.ac.id%2Findex.php%2Fpolitico%2Farticle%2Fviewfile%2F30760%2F29552>.

- Sholihah, Aulia, And Tulus Santoso. 2022. “Pengaruh Kepercayaan Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat.” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 2 (2): 189–96.
- Siregar, Robert Tua. 2021. *Ekonomi Pembangunan: Tinjauan Manajemen Dan Implementasi Pembangunan Daerah*. Yayasan Kita Menulis.
- “Sugiarti, Bentuk-Bentuk Musrenbang , Wawancara, 12 Desember 2024.” N.D.
- Sukardi. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susilowati, Retno, Khairunnas Khairunnas, Rahmat Rafinzar, And Maudy Noor Fadhli. 2022. “Analisis Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan.” *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan* 5 (2): 96–111. <https://doi.org/10.24905/Igj.V5i2.66>.
- Tahulending, Ricardo, Markus Kaunang, And Ismail Sumampow. 2018. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrembang) Di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat.” *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2 (2): 1–11.
- Yuniza, Marni, And Hasbullah Malau. 2025. “Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Nagari Koto Taratak Kabupaten Pesisir Selatan” 06 (01): 1–12.
- ation By Local Government. *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8, (2), 127-142.
- Ilham, M., Setiawan, I. & Nawawi, M. (2019). Analisis Penguatan Sumberdaya Daerah Dalam Pelaksanaan Smart Governance Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. *Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 9, (1), 63-74. DOI: <https://doi.org/10.33701/Jiwbp.V9i1.320>

Pustaka yang Berupa Buku:

- Azwar, S. (2007). *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lunsford, A. & Ede, L. (2009). *Child education: Perspective on teaching activities*. Carbondale: Illinois University Press.

Willig, C. (2008). *Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method*. (2nd ed.). London: McGraw-Hill Open University Press.